

NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

Yustina Wahyu Dwijayanti

yustinacruz@gmail.com

Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Hamidah

hamidah@feb.unair.ac.id

Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Tax amnesty is a government program that has the main objective of repatriating Indonesian owned funds stored overseas or owned by Indonesian taxpayers. Researchers use Theory of Planned Behavior as a basis to analyze the intention of the taxpayer in behaving to join the tax amnesty program. Behavioral intent is determined by three determinants of Attitude towards the behavior, subjective norms and perceived behavioral control. Researchers use the phenomenology approach because this method can reflect the direct experience of humans. Researchers will conduct semi-structured interviews to six individual taxpayers attending the tax amnesty program. Respondents in this study include two people taxpayers personally who work as an employee in the field of tax accounting, two people taxpayers personally UMKM, two person taxpayer person as an entrepreneur. Respondents follow this tax amnesty because of the influence of people around such as business partners, tax consultants and officers Tax Office. The results of this study, taxpayers did not report his property as a whole because government is not consistent with the program before the tax amnesty program. In addition, the number of individuals who use the gap and government funds for personal purposes make respondents are reluctant to pay taxes

Keywords: Tax Amnesty, Phenomenology, Theory of Planned Behavior

I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak untuk lima tahun terakhir ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah selalu berusaha melakukan berbagai macam cara dan program agar target penerimaan negara ini dapat tercapai salah satunya melalui program *tax amnesty*. Pemberlakuan program *tax amnesty* ini diharapkan dapat menutupi kekurangan dana dalam jangka pendek dan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pajak dalam jangka panjang. Tujuan utama *tax amnesty* adalah memasukkan kembali ke dalam negeri investasi atau dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Dana yang berhasil direpatriasi ke dalam negeri akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan agar arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata. Oleh sebab itu dalam penelitian

NIAT DAN PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

ini akan memfokuskan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang merupakan sasaran utama dari *tax amnesty*.

Tahun 2018 adalah tahun dimana Indonesia akan masuk dalam era keterbukaan informasi. Dalam mempersiapkan hal ini pemerintah menerbitkan undang-undang *tax amnesty*. Apabila era keterbukaan informasi telah terjadi maka pemerintah membutuhkan basis data yang akurat yang akan digunakan untuk pertukaran informasi antar negara. Pemerintah berharap dengan adanya program *tax amnesty* ini, wajib pajak akan mengungkapkan semua harta yang dimiliki secara transparan.

Pemerintah memberikan keuntungan yang menarik ketika wajib pajak mengikuti program ini. Keuntungan yang diterima wajib pajak jika mengikuti program *tax amnesty* cukup membuat wajib pajak tergerak untuk mengikuti program ini. Keuntungan yang diterima wajib pajak antara lain penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. Namun dibalik usaha pemerintah dengan keuntungan yang ditawarkan, wajib pajak juga memiliki kepentingan dan niat tersendiri mengapa ia memilih untuk mengikuti program *tax amnesty* ini. Adanya perbedaan kepentingan dan sudut pandang di atas membuat peneliti ingin meneliti apa yang menjadi niat bagi wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti program *tax amnesty* ini.

Peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai dasar untuk menganalisis niat dari wajib pajak dalam berperilaku untuk mengikuti program *tax amnesty*. Konsep *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk memaparkan niat wajib pajak untuk berperilaku. Perilaku wajib pajak akan muncul diakibatkannya adanya niat untuk berperilaku. Dalam hal ini adalah niat wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang untuk berperilaku akan ditentukan oleh 3 faktor yaitu *behavioral beliefs*, *Normatif beliefs* dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* adalah perilaku didasari oleh keyakinan individu akan hal tersebut dan evaluasi atas hasil dari perilaku tersebut. Faktor kedua adalah *Normatif beliefs*. *Normatif beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang berada disekitarnya yang memiliki pengaruh terhadapnya dan motivasi untuk memenuhi harapan orang tersebut sedangkan faktor ketiga adalah *control beliefs*. *Control beliefs* berarti keyakinan seseorang tentang adanya hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan dilakukan dan persepsi dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*power of control factor*).

Beberapa penelitian telah menggunakan *Theory of Planned Behavior* untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Widi & Argo (2011) menyebutkan bahwa kewajiban moral dan alasan wajib pajak untuk tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak. Hasil penelitian yang berbeda muncul dalam penelitian Theresia (2012) dimana Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap alasan untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena metode ini dapat mencerminkan pengalaman langsung seseorang,

sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek (Kuswarno, 2009:1). Fenomenologi dapat mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena yang terjadi. Peneliti ingin memahami dan menjelaskan apa yang menjadi niat wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty* dilihat dari pandangan orang tersebut mengenai *tax amnesty*, pengaruh orang disekitarnya dan faktor yang menghambat atau mendukung keputusan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Fokus peneliti adalah pengalaman wajib pajak orang pribadi. Tujuan peneliti memilih wajib pribadi adalah wajib pajak pribadi merupakan target pemerintah dalam program ini selain itu wajib pajak pribadi dianggap lebih bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai pengalaman dan niatnya mengikuti *tax amnesty* dibandingkan wajib pajak badan. Dimana wajib pajak badan dalam mengambil suatu keputusan ditentukan oleh banyak pihak yang memiliki wewenang masing-masing.

Berdasarkan latar diatas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana niat dan perilaku wajib pajak orang pribadi mengikuti program *tax amnesty*.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Tax amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan. *Tax amnesty* bertujuan untuk (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. (3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Wajib pajak diharapkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* ini dengan membayar uang tebusan yang dihitung dari tambahan harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH).

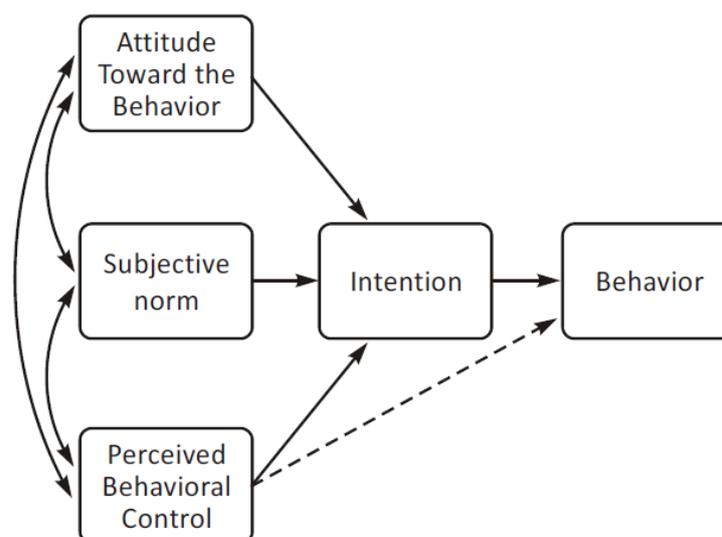
Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas *Tax amnesty* berupa penghapusan pajak terutang, Penghapusan sanksi administrasi perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, dan Penghentian pemeriksaan pajak. Fasilitas diatas membuat wajib pajak antusias mengikuti program *tax amnesty*. Namun dibalik manfaat yang diberikan oleh pemerintah, terdapat sanksi yang cukup besar apabila wajib pajak hanya sekedar mengikuti *tax amnesty* namun tidak melapokan semua harta yang dimilikinya. Sanksi ini harus dipertimbangkan oleh wajib pajak ketika mereka memilih untuk tetap menyembunyikan hartanya. Harta yang disembunyikan akan dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Selain itu denda juga ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

2.2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, penentu utama perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk melakukan suatu perilaku merupakan kombinasi dari sikap untuk berperilaku dan norma subjektif dan keyakinan atas hal yang mendukung dan menghambat suatu perilaku.

Konsep atau faktor pembentuknya di dalam *Theory of Planned Behavior* antara lain:

Gambar 1. *Theory of Planned Behavior*



(Sumber Ajzen, 2005; hlm 118)

Hubungan antara ketiga dimensi penentu niat dan perilaku dapat dilihat di Gambar 1, dengan penjelasan singkat dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. *Attitude towards the behavior* (Sikap)

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan dan evaluasi dalam membentuk sikap terhadap perilaku tertentu. Keyakinan bersifat unik individual sehingga dapat digunakan menjadi alat pengukur dalam penelitian berbasis TPB.

Bila dikaitkan dengan program *tax amnesty*, apabila wajib pajak akan mengikuti program ini berarti wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai manfaat yang diperolehnya. Wajib pajak akan mempertimbangkan apakah manfaat yang diterima akan lebih besar daripada tebusan yang akan dibayarkan. Apabila seseorang meyakini bahwa terdapat konsekuensi positif yang akan ia dapatkan, orang tersebut akan memilih melakukan perilaku tersebut begitu pula sebaliknya.

2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Seseorang akan cenderung melakukan suatu hal jika lingkungan sekitarnya mendukung hal tersebut. Hal ini diketahui dengan cara memberi pertanyaan pada responden untuk menilai apakah orang-

orang lain yang penting tadi cenderung akan setuju atau tidak setuju jika ia memilih untuk melakukan suatu perilaku.

3. *Perceived behavioral control* (Persepsi kontrol perilaku)

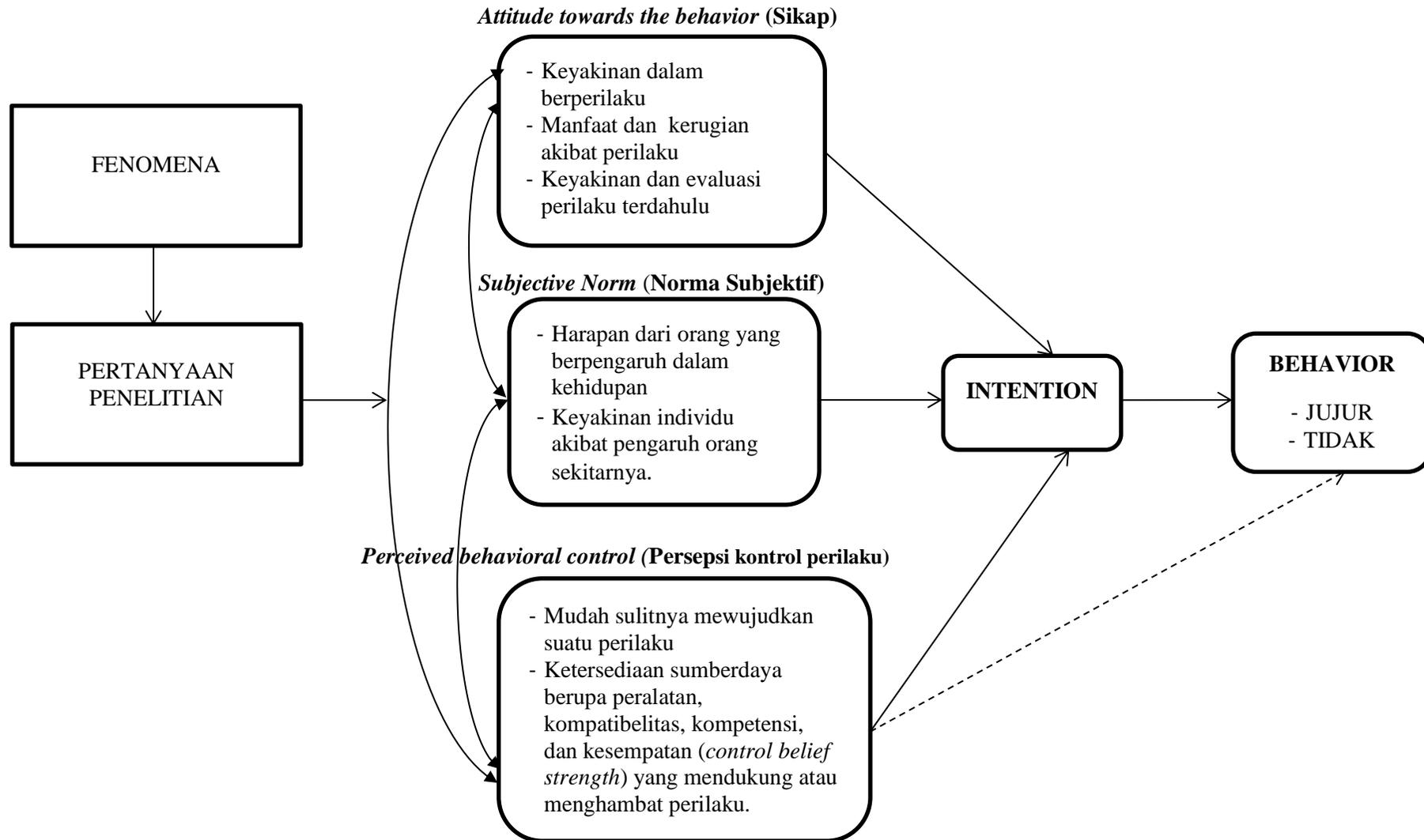
Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). . Dalam TPB, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut.

III. KERANGKA PENELITIAN

Penelitian ini berawal dari adanya suatu fenomena dimana target penerimaan pajak dari program *tax amnesty* tidak tercapai. Target penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini sebesar 165 triliun namun pada akhir masa *tax amnesty* penerimaan yang masuk hanya mencapai Rp114 triliun. Kemudian muncul pertanyaan apakah yang menjadi niat wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*. Hal ini untuk melihat apakah kegagalan pencapaian target *tax amnesty* tersebut disebabkan oleh niat wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur kepada enam wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *tax amnesty*. Dimana panduan wawancara akan dibuat berdasarkan tiga faktor penentu niat atau keinginan untuk berperilaku berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yaitu attitude toward the behaviour (sikap), subjective norm (norma subjektif), dan perceived behavioral control (persepsi kontrol perilaku).

Gambar 2. Kerangka Penelitian



IV. METODE PENELITIAN

4.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu peristiwa secara lebih mendalam. Paradigma yang digunakan adalah interpretif. Burrell dan Morgan (1979:20) menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan metode fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang dalam hal ini objek penelitian yang mengalami secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkannya padanya (Kuswarno, 2009:35). Dalam penelitian ini peneliti harus menggali informasi mengenai pemahaman dan pandangan informan mengenai program dan aturan *tax amnesty*. Peneliti harus memahami secara mendalam mengenai objek penelitian yaitu aturan mengenai *tax amnesty* sehingga dapat menggali informasi dari informan secara mendalam dan detail. Khususnya peneliti harus menggali informasi mengenai niat dari informan dalam mengikuti program besar pemerintah Indonesia di bidang perpajakan yaitu *tax amnesty*.

4.2. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang ditentukan oleh peneliti dimana sumber data tersebut berhubungan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada enam wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *tax amnesty* yang dikelompokkan dalam empat kategori yang mewakili suatu profesi. Penelitian mengambil informan dua orang dari masing-masing kategori untuk mendapatkan perbandingan antar jawaban informan yang satu dengan informan lain dalam satu kategori.

1. Dua orang wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawan di bidang *tax accounting*. (Responden 1 dan Responden 2)
2. Dua orang wajib pajak orang pribadi UMKM. (Responden 3 dan Responden 4)
3. Dua orang wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha. (Responden 5 dan Responden 6)

Selain melakukan wawancara, peneliti juga akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perpajakan yang ada mengenai *tax amnesty* kemudian peneliti memahami maksud dari peraturan tersebut. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Surat Pernyataan Harta (SPH) dari masing-masing individu, dokumen-dokumen seperti peraturan perpajakan dan berita-berita yang terdapat di media cetak maupun media online.

4.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode ini dipilih agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan pada saat dilakukan wawancara. Pedoman wawancara telah dipetakan menjadi tiga bagian utama yang didasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB). Bagian pertama untuk menggali informasi mengenai Attitude towards the behavior atau sikap dan pandangan wajib pajak mengenai program *tax amnesty*. Bagian kedua untuk menggali subjective norm yaitu pandangan orang disekeliling wajib pajak yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak. Bagian ketiga untuk menggali informasi perceived behavioral control mengenai apa yang mendukung dan menghambat wajib pajak dalam mengikut program *tax amnesty*.

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono:2009):

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dalam penelitian ini diambil dari informan dengan profesi yang berbeda-beda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *documentation* dan *interview* (wawancara). Data diperoleh dengan wawancara akan di cek dengan peraturan *tax amnesty* dan dokumen wajib pajak untuk kepentingan mengikut *tax amnesty*.

4.4. TEKNIK ANALISIS

Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga bagian yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis pada saat melakukan wawancara.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian ini penyajian data akan dibuat dalam bentuk bagan yang disertai uraian singkat. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

4.5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada enam responden didapatkan hasil mengenai yang paling mempengaruhi niat mereka dalam mengikuti program *tax amnesty* adalah *Subjective Norm* (Norma Subjektif). Norma Subjektif adalah mengenai harapan atau ekspektasi orang disekitarnya. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara kepada responden 1:

“Sebener’e aku gak ngerti yus (peneliti) TA iku apa terus aku tanya ke KPP waktu lapor SPT, terus dijelasno terus orang KPP bilang ikut aja bu daripada nanti diperiksa lo, ya wes akhir e aku ikut. Semua tak laporno hartaku biar ga susah ke depan e.”

Responden 1 mengungkapkan bahwa ia mengikuti TA karena pengaruh petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dia juga mengungkapkan bahwa sosialisasi di KPP mengenai TA ini sangat gencar dilakukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyukseskan program ini.

Hal yang sama juga diungkapkan responden 6 bahwa ia mengikuti TA karena pengaruh rekan bisnis dan konsultan pajaknya. Namun ada hal yang harus digaris bawahi dari hasil wawancara ini bahwa wajib pajak meyakini bahwa pemerintah belum siap dengan era keterbukaan yang selama ini selalu disosialisasikan. Pandangan dan sikap responden (*Attitude towards the behavior*) bahwa sebenarnya pemerintah belum siap untuk era keterbukaan karena masih banyaknya oknum. Responden juga memiliki rasa tidak percaya kepada pemerintah karena merasa program ini masih kurang jelas arahnya kemana. Responden merasa banyak program pajak yang realisasi aturannya tidak seperti yang ada di undang-undang. Hal ini juga membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak dan melaporkan semua hartanya seperti yang diungkapkan responden 6 dibawah ini:

“Temen-temen yang lain ada ikut sekedarnya tapi ada yang suruh ikut melaporkan semua, tak pikir-pikir buat apa ikut lapor semua, program e lo ga jelas kayak program yang kemarin-kemarin. Nanti lak ada program baru lagi. Konsultan juga menyarankan ikut sih katanya harus hati-hati dengan era keterbukaan nanti. Tapi pemerintah aja belum siaplah untuk era keterbukaan masih banyak oknum.”

Responden 4 yang merupakan wajib pajak UMKM menyebutkan bahwa Ia mengikuti TA karena tarif tebusan yang murah. Hal ini bisa mendorong UMKM untuk semakin berkembang dan dapat menopang perekonomian negara. Pemerintah memberikan tarif tebusan yang lebih rendah dibandingkan wajib pajak lain. Bagi UMKM yang melakukan deklarasi harta sampai dengan Rp 10 miliar, membayar uang tebusan sebesar 0,5%. Untuk UMKM yang melakukan deklarasi harta di atas Rp 10 miliar, membayar uang tebusan sebesar 2%.

NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

“Tarif untuk UMKM murah jadi ya ikut aja biar besok-besok ga ribet dan yang tahun lalu gak di otak-atik. Ribet mbak kalau diperiksa itu, ya ws cari aman e ae lah.”

Responden mengikuti TA karena masing-masing memiliki pandangan tersendiri mengenai program tersebut. Namun sebagian besar responden mengikuti TA ini karena menghindari “dosa masa lalu” bukan untuk mengungkakan keseluruhan harta dari wajib pajak.

Responden 2:

“TA bagus lah. Biar pengusaha-pengusaha besar laporkan semua hartanya. Pasti masih banyak yang disembunyikan. Tapi pasti wajib pajak lebih pinter sih hehehe. Kalau aku sih ikut aja laporkan toh hartaku ga banyak hehehe.”

Responden 3:

“TA sebenarnya tujuannya bagus, kalau ga jujur sanksinya besar tapi pasti wajib pajak e segini banyak e dibanding petugas pajak’e. pasti susah lah control nya. Wajib pajak pasti punya lebih banyak cara untuk berkelit”

Responden 5:

“Pajak sekarang tambah ribet, bisnis lebih susah jalan, pajak semakin besar tapi pemerintah ga konsisten, banyak oknum, banyak penyelewengan, buat apa ikut TA bayar pajak besar, realisasi e ga jelas kemana.”

“Pemerintah sendiri gak konsisten dengan program-programnya. Buktinya sekarang setelah TA ada program lagi ini PAS FINAL. Aku sudah nebak gak mungkin pemerintah seberani itu. Harusnya kalau memang mau tegakkan peraturan TA kemarin ya uda langsung denda aja gak usa keluarin peraturan baru, bikin wajib pajak ragu sama konsisten peraturan pemerintah. Ga salah kalau TA kemarin targetnya gagal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, wajib pajak memiliki sikap atau pandangan tersendiri mengenai *tax amnesty* (*Attitude towards the behavior*). Mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap program *tax amnesty* ini. Terbukti dengan adanya program baru setelah masa *tax amnesty* berakhir yaitu PAS final yang sering disebut *tax amnesty* jilid 2. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten untuk menerapkan sanksi *tax amnesty* sehingga wajib pajak juga menjadi tidak percaya terhadap program pemerintah selanjutnya. Selain itu banyaknya oknum yang memanfaatkan celah dan dana pemerintah untuk keperluan pribadinya membuat responden enggan untuk membayar pajak.

V. KESIMPULAN

Tax amnesty adalah program pemerintah yang memiliki tujuan utama memasukkan kembali ke dalam negeri investasi atau dana-dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Melalui program *tax amnesty* pemerintah berharap wajib

NIAT DAN PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

pajak akan mengungkapkan harta yang dimiliki wajib pajak secara transparan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat wajib pajak dalam mengikuti program ini dipengaruhi oleh *Attitude towards the behavior* (Sikap) dan *Subjective Norm* (Norma Subjektif). Responden mengikuti tax amnesty ini karena pengaruh orang sekitar seperti rekan bisnis, konsultan pajak dan petugas Kantor Pelayanan Pajak. Namun yang menjadi sebab wajib pajak enggan melaporkan seluruh hartanya adalah pemerintah tidak konsisten terhadap program *tax amnesty* ini. Terbukti dengan adanya program baru setelah masa *tax amnesty* berakhir yaitu PAS final yang sering disebut *tax amnesty* jilid 2. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten untuk menerapkan sanksi *tax amnesty* sehingga wajib pajak juga menjadi tidak percaya terhadap program pemerintah selanjutnya. Selain itu banyaknya oknum yang memanfaatkan celah dan dana pemerintah untuk keperluan pribadinya membuat responden enggan untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). Theory of Planned Behavior, Masihkan Relevan. Available: <http://zakarija.staff.umm.ac.id/files/2010/12/Theory-of-Planned-Behavior-Masihkah-relevan1.pdf>. Diakses tanggal 08 Agustus 2017.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*, (2nd edition), Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.
- Cahyani, A. N. (2014). Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Perdagangan Untuk Membayar PPh Pasal 25/29 Dalam Tinjauan Planned Behavior of Theory (Studi Kasus pada KPP Pratama Ponorogo). *Skripsi Jurusan Akutansi-Fakultas Ekonomi UM, 2014*(2014).
- Damayanti, T. W. (2012). Changes on Indonesia Tax Culture, Is there a way? Studies through theory of planned behavior. *Researchers World*, 3(4), 8.
- Dian, Monica. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.).*Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, Bambang. (2011). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening. *Peran dan Implementasi Statistika dalam Analisis Finansial dan Pengambilan Keputusan Bisnis, Semarang*.
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2011). Studi empiris *Theory of Planned Behavior* dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), pp-82.
- I Nyoman Darmayasa dan Yuyung Rizka. (2015). *Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia*. Politeknik Negeri Bali dan STIE Kesuma Negara Blitar.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi : Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

NIAT DAN PERILAKU WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)

- Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RusdaKary.
- Mutiara Mutiah, Gita Arasy dan Fitri Ahmad. (2011). *Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Novana, Mira. (2010). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jendertal Pajak Jawa Timur 1 Surabaya). *Tesis. Universitas Diponegoro Semarang*
- Ramayah, T., Yusoff, Y. M., Jamaludin, N., & Ibrahim, A. (2009). Applying the *Theory of Planned Behavior* (TPB) to predict internet tax filing intentions. *International Journal of Management*, 26(2), 272.
- Ramdhani, N. *Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior*. *Buletin Psikologi*, 19(2).
- Ratung Tatiana dan Hari Adi Priyo. (2009). Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax amnesty*.
- Republik Indonesia. *PER 11/PJ/2016 Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax amnesty*.
- Sari, E. R. (2015). Pemahaman Wajib Pajak Atas Pemanfaatan Teknologi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Tinjauan Berdasarkan Theory of Planned Behavior). *Tugas Akhir Jurusan Akuntansi-Fakultas Ekonomi UM*.
- Sari, N. P. (2014). Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Sugiono, Ludigdo dan Baridwan. (2015). *Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima*. Universitas Islam Madura dan Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesebelas (Bandung : Alfabeta)
- Syakura, M. A., Khairin, F. N., Ginting, Y. L., Kusumawardani, A., & Fitria, Y. (2016, May). A Behavioral Study on Voluntary Compliance of E-Commerce Tax. *In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series*.
- Widi Dwi dan Bambang Purnomosidhi. (2011). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening. *Politeknik Negeri Malang*

*NIAT DAN PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGIKUTI PROGRAM
TAX AMNESTY (STUDI FENOMENOLOGI)*

Winarsih, E. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo). *MAGISTRA*, 26(91), 8.